

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pasuruan



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Pahlawan No. 22 A Kota Pasuruan

Nomor Telepon : (0343) 424524

Website : <https://pupr.pasuruankota.go.id/>

E-mail : dpupr@pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan. Pada dasarnya LKjIP merupakan gambaran dari hasil - hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun - tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat berm anfaat bagi semua pihak.

Kota Pasuruan, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19670824 199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang didukung dengan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Jalan, Indeks Layanan Drainase, Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Indeks Penataan Ruang. Secara umum capaian kinerja organisasi sesuai dengan PK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dalam kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105.94%.

1. Indeks Kualitas Jalan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 73,28% dan terealisasi sebesar 73,22% sehingga nilai capaian sebesar 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Indeks Layanan Drainase pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,14% dan terealisasi sebesar 82,07% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.

3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 59,93% dan terealisasi sebesar 59,71% sehingga nilai capaian sebesar 99.63% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya pembangunan semasa covid 19 membuat ada kesenjangan besar antara target dan capaian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukan pembangunan yang melebihi target tahunan sehingga kesenjangan bisa dikejar di tahun-tahun berikutnya dan target rpjmd dapat tercapai.
4. Indeks Penataan Ruang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 69.40% dan terealisasi sebesar 86.25% sehingga nilai capaian sebesar 124.28% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 yang sudah ditetapkan serta RDTR yang terintegrasi dengan OSS sehingga meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Pasuruan. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah adanya perubahan regulasi pada masa transisi pelaksanaan Perda RTRW dan Perwali RDTR sehingga butuh banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	5
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.2.2 Anggaran.....	6
1.2.3 Isu Strategis.....	7
1.3 Dasar Hukum.....	8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian Kinerja.....	43
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	43
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	43
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	52
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	53
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	54
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	56
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	59

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	61
3.2 Realisasi Anggaran	70
BAB IV PENUTUP.....	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Table 1.2.3 Pemetaan Isu Strategis	7
Tabel 2.1 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	11
Tabel 2.1 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022	12
Tabel 2.2 1 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
Tabel 2.3 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	15
Tabel 2.3 2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	16
Tabel 2.3 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	29
Tabel 2.3 4 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	31
Tabel 3.1 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	43
Tabel 3.1 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 3.1 3 Perbandingan Capaian Kinerja	52
Tabel 3.1 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	53
Tabel 3.1 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	54
Tabel 3.1 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	56
Tabel 3.1 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	60
Tabel 3.1 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	61
Tabel 3.2. 1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan SE Menteri PANRB no 5 tahun 2021, berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan perangkat daerah disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir serta disampaikan pada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui esr.menpan.go.id yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Selarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

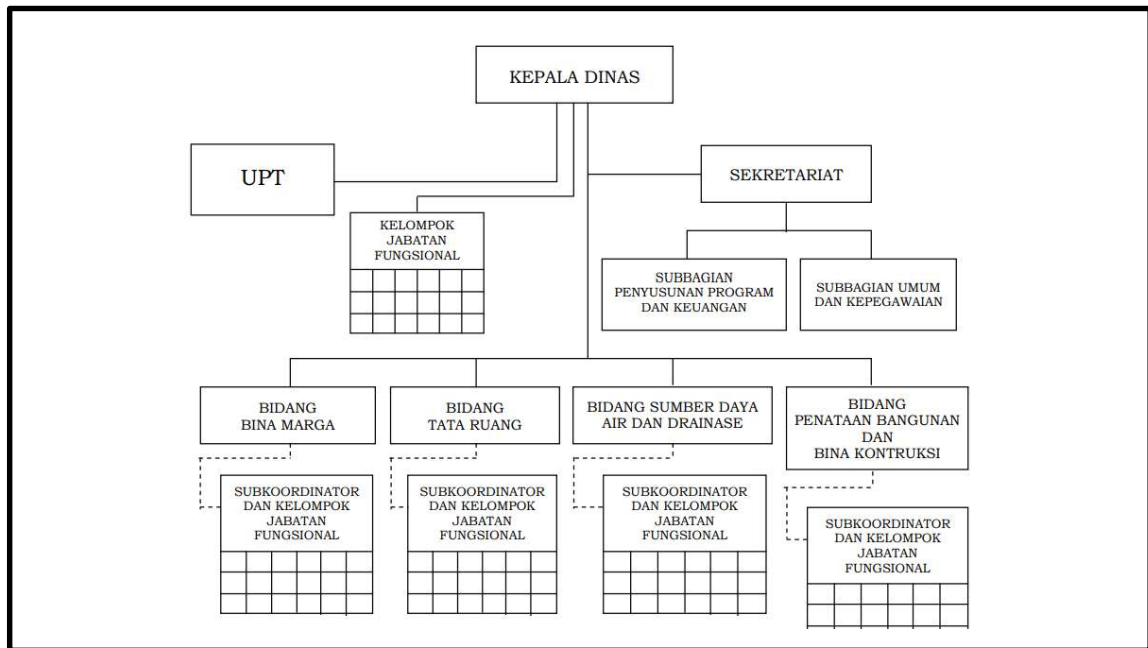
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;

- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. pembinaan terhadap UPT.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan



Sumber : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2.2 Anggaran

Pada Tahun 2021 dan 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perbandingan anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.2.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2021	Rp107.969.685.762,00
APBD	2022	Rp40.640.195.566,00
DAK	2021	Rp8.410.530.835,00
DAK	2022	Rp4.289.976.500,00

Sumber : Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran DPUPR TA 2021 dan 2022

1.2.3 Isu Strategis

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan 2021-2026, dijelaskan bahwa Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga berpengaruh terhadap tercapainya sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PD Provinsi Jawa Timur yakni Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selain itu, isu – isu strategis ini juga didasarkan pada permasalahan yang berdampak pada implementasi RTRW dan KLHS pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat dilakukan perumpunan permasalahan dan ditarik menjadi beberapa isu strategis sebagai berikut:

Table 1.2.3 Pemetaan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Masih belum optimalnya rencana tata ruang sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Masih belum optimal dan belum sesuai antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2	Masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	
3	Tidak/kurang optimalnya fungsi saluran (pelayanan infrastruktur yang belum memadai)	Menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi
4	Kapasitas saluran drainase menurun	
5	Masih adanya kondisi jalan yang belum mantab	
6	Terbatasnya jumlah bangunan Gedung negara yang berkualitas	
7	Belum terealisasinya pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara	Menjamin ketersediaan tanah sesuai kebutuhan Dinas PUPR untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu

Salah satu isu strategis yang diangkat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul baik pada saluran irigasi dan drainase maupun pada jalan, jembatan serta bangunan gedung. Saat ini masih banyak warga yang sering membuang sampah ke saluran yang dapat mengakibatkan saluran tidak berfungsi dengan baik. Banyak pula pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermuatan tidak sesuai dengan kelas jalan yang mengakibatkan banyak jalan bergelombang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab untuk menjamin kondisi infrastruktur pekerjaan umum/perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3 Matrik Renstra 2021-2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Tujuan dan Sasaran beserta Indikator pada Renstra Perangkat Daerah dituangkan pada table dibawa ini:

**Tabel 2.1 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial			Indeks Infrastruktur	72,00%	73,05%	74,35%	75,80%	76,95%
		1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73,98%	76,36%	77,75%	79,14%
				Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	83,42%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	66,25%
			Indeks Penataan Ruang	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	94,75%

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial ndeks Kualitas Jalan	1.1	Indeks Kualitas Jalan	%	Indeks Kualitas Jalan dibentuk dari indikator persentase jalan kota dan bangunan penunjangnya dalam kondisi baik dan sedang serta indikator persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	70% x persentase jalan kota dan bangunan penunjangnya dalam kondisi baik dan sedang + 30% x jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Bidang Bina Marga
		1.2	Indeks Layanan Drainase	%	Indeks Layanan Drainase dibentuk dari persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase drainase dalam kondisi baik.	(Persentase irigasi kondisi baik + persentase drainase kondisi baik) : 2 x 100	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Indeks layanan drainase memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan drainase			
		1.3	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dibentuk dari jumlah Gedung negara dalam kondisi baik dan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Indeks kualitas bangunan Gedung negara memudahkan pemerintah untuk mengukur dan membandingkan dampak dari penggunaan APBD dalam pembangunan Gedung negara	Jumlah Gedung negara dalam kondisi baik : Jumlah Gedung Negara yang dibutuhkan x 100	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
		1.4	Indeks Penataan Ruang	%	Indeks Penataan Ruang dibentuk dari persentase Kawasan yang mempunyai	30% x Persentase Kawasan yang mempunyai rencana detail +	Bidang Tata Ruang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				rencana detail dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Indeks penataan ruang memudahkan pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW serta berapa jumlah rencana detail yang dimiliki oleh Kota Pasuruan	70% x persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Target Tujuan dan Sasaran berserta Indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2022 dijelaskan pada table di bawah ini:

Tabel 2.2 1 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial		Indeks Infrastruktur	%	72,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	%	73,28
				Indeks Layanan Drainase	%	82,14
				Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	59,93
				Indeks Penataan Ruang	%	69,40

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	B
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.422.170.200
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp4.054.990.563
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp4.404.180.534
4. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.086.298.300
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp1.801.479.500
6. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp39.251.687.790
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp825.835.577
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp918.059.400
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp976.069.348
10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp151.513.800
11. Program Penatagunaan Tanah	Rp89.909.590

Rincian mengenai anggaran berdasarkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.3 2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	9 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	14 Bulan
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	14 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun	8 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun	6 Dokumen
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengajian Rutin	12 kali
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	11 Jenis
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	3600 Exemplar
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1116 Kota
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar kota	92 Kali
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	10 Unit
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	2 Jenis
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara rutin	19 Unit
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan UPT Uji Mutu yang terpelihara	4 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipeliharakan secara rutin	28 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara secara rutin	1 Gedung Kantor
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	84,89
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	84,89
a	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun	18 m ²

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petani pemakai air yang dibina	44 orang
c	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomendasi teknis saluran irigasi dan drainase	2 Dokumen
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	84,89
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	1376 meter
		Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun (refocusing)	480 meter
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	2630 meter
		Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab (pokir)	620 meter
		Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab (refocusing)	2907 meter
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi yang dipelihara secara rutin	20 Lokasi
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	99,29
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang ditingkatkanLangsung dengan Sungai	99,29
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	3001 m
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang direhab (refocusing)	1086 m
c	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	1 Dokumen
d	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	8 Lokasi
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	84,86
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang terlaksana	84,86
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rapat penerbitan SLF dan Rekom PBG yang dilaksanakan	12 Kali
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun dan diserahkan kepada pihak ketiga	1 BGN
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan	12 kali
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsui	9 BGN
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	60,56

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	60,56
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12 Kali
b	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan bangunan yang tertata	4 BGN
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapya dalam kondisi baik dan sedang	74,36
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	78,87
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	74,36
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen pemutakhiran jaringan jalan	1 Dokumen
		Dokumen perencanaan teknis yang disusun	17 Dokumen
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	umlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara	8 Kelurahan
c	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas jalan yang terdata	10 Ruas
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang terdata	27 Jembatan
		Jumlah ruas jalan yang terdata	97 Ruas
e	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkapya yang direkonstruksi/ditingkatkan	3 Ruas
		Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkapya yang direkonstruksi/ditingkatkan (musren prioritas 1)	1 Ruas

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (musren prioritas 2)	4 Ruas
		Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (pokir prioritas 1)	1 Ruas
		Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan (pokir prioritas 2)	4 Ruas
		Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya (DAK)	3 Ruas
f	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	1 Ruas
		Jumlah jalan yang dipelihara (DAK)	3 Ruas
g	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahankan kondisinya	40 Ruas
h	Pemeliharaan rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	27 Jembatan
i	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	1 Dokumen
j	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pengawasan teknis yang disusun	14 Dokumen
		Dokumen pengawasan teknis yang disusun (DAK)	7 Dokumen
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan informasi layanan jasa konstruksi	82
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	81
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	81
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dibina	120 pekerja konstruksi
b	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina	80 badan usaha

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	82
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terupdatenya data pada aplikasi SIPJAKI secara berkala	4 Kali
b	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan HSBGN	16 dokumen
c	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan di Kota Pasuruan	4 Kali
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	16,67
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	80
a	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	90
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	80
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kota Pusaka	60 orang
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	80
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	70

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	28
19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	28
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan	1 Lokasi
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	36,67
20	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	36,67
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Bidang yang Terfasilitasi	750 orang bidang
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	20
21	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	20
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah dikonsolidasi	8 Kelurahan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp18.250.050
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp18.250.050
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp7.140.328.776
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.050.049.176
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Rp90.279.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp30.599.910
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp30.599.910
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp81.090.100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.789.800
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp76.300.300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp635.562.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp362.486.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp34.433.250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp15.886.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp18.130.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp204.625.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp494.308.900
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp420.856.300
Pengadaan Mebel	Rp24.993.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp48.459.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp394.370.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17.251.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp377.119.350
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp627.658.964
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp219.463.258

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp57.173.543
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp23.781.793
	Rp327.240.370
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp192.212.360
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp127.731.100
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp21.340.760
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp43.140.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.862.778.203
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp807.103.800
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.128.226.400
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.927.448.003
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.404.180.534
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp94.685.400
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp2.168.489.200
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp192.537.000
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Rp1.948.468.934
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp4.086.298.300
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp75.763.100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp645.358.100
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.733.700
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.320.443.400
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.801.479.500
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rp58.207.200
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp1.743.272.300
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp39.251.687.790
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp70.738.000
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp19.930.360.160
Pengelolaan Leger Jalan	Rp104.977.130
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp174.115.900
Rekonstruksi Jalan	Rp11.790.998.600
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp4.224.019.100
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp1.862.828.108
Pemeliharaan rutin Jembatan	Rp629.304.996
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp53.658.746
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp410.687.050
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp246.177.629
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp194.902.729
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp51.274.900
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp579.657.948
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp25.454.200
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp27.720.600

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Rp526.483.148
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp72.378.900
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp72.378.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp584.787.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp584.787.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp260.892.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Rp260.892.800
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp976.069.348
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp976.069.348
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp151.513.800
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp151.513.800
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp89.909.590
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp89.909.590

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Selain itu pada saat penyusunan Dokumen Renstra tahun 2021 terdapat kesalahan administrasi pada saat penentuan IKU yaitu:

1. Kesalahan dalam indikator tujuan, dimana indikator Indeks Infrastruktur merupakan Indikator Kepala Daerah yang dalam hal ini kewenangan Bappelitbangda. Seharusnya indikator tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. IKU tidak memperhitungkan indikator kinerja terkait kegiatan kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk mengajukan permohonan penyusunan reuiu Dokumen Renstra tahun 2021 – 2023 di tahun 2023. Sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana uraian target kinerja berikut

Tabel 2.3 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	-
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	-
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	-

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Program

- | | |
|--|------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp8.203.079.873 |
| 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp4.041.110.563 |
| 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Rp4.375.680.534 |
| 4. Program Penataan Bangunan Gedung | Rp4.661.214.300 |
| 5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Rp1.801.479.500 |
| 6. Program Penyelenggaraan Jalan | Rp19.805.407.410 |
| 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp629.837.748 |
| 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp720.959.400 |
| 9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Rp487.979.348 |
| 10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Rp151.513.800 |
| 11. Program Penatagunaan Tanah | Rp51.909.590 |

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 4 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	9 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	14 Bulan
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	14 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang OPD yang tersusun	8 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersusun	6 Dokumen
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengajian Rutin	12 kali
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	11 Jenis
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	3600 Exemplar
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	144 Kaleng
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke luar kota	92 Kali
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 Unit
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	2 Jenis
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara rutin	36 Unit
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan UPT Uji Mutu yang terpelihara	4 Unit
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipeliharakan secara rutin	92 Unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara secara rutin	1 Gedung

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	84,89
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	84,89
a	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Luas pintu air yang dibangun	19 m2
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petani pemakai air yang dibina	100 orang
c	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomendasi teknis saluran irigasi dan drainase	2 Dokumen
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	84,89
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	438 meter
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	1377 meter
c	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi dan Drainase Irigasi yang dipelihara secara rutin	20 Lokasi
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	99,29

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkanLangsung dengan Sungai	99,29
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-
b	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	2660 m
c	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang tersedia	1 Dokumen
d	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah drainase kota yang dipelihara secara rutin	11 Lokasi
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	84,86
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang terlaksana	84,86
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rapat penerbitan SLF dan Rekom PBG yang dilaksanakan	12 Kali
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara dan prasarana pendukungnya yang terbangun dan diserahkan kepada pihak ketiga	1 BGN
c	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan	14 kali

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
d	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kota yang direhabilitasi, direnovasi dan diubahsuai	9 BGN
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	60,56
13	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	60,56
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 Kali
b	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan bangunan yang tertata	2 BGN
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang	74,36
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	78,87
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	74,36
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan teknis yang disusun	4 Dokumen
b	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	umlah tanah yang dibebaskan untuk Jalan Lingkar Utara	2 Kelurahan
c	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah ruas jalan yang terdata	10 Ruas
d	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang terdata	27 Jembatan
		Jumlah ruas jalan yang terdata	97 Ruas

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
e	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang direkonstruksi/ditingkatkan	2 Ruas
f	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara	2 Ruas
g	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap yang dipertahankan kondisinya	40 Ruas
h	Pemeliharaan rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	27 Jembatan
i	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	1 Dokumen
j	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen pengawasan teknis yang disusun	2 Dokumen
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan informasi layanan jasa konstruksi	82
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat keterampilan	81
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	81
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dibina	120 pekerja konstruksi
b	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyedia badan usaha jasa konstruksi yang dibina	80 badan usaha
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	82
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terupdatenya data pada aplikasi SIPJAKI secara berkala	4 Kali
b	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen standar harga, upah, bahan dan HSBGN	16 dokumen
c	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan di Kota Pasuruan	4 Kali

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	16,67
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	92
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	16,67
a	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	38 Kali
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	92,00
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang	92,00
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	12
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	28
19	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu	2
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang disusun	5 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
X	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase petak tanah yang bersertifikat	36,67
20	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	36,67
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah petak tanah yang bersertifikat	2 Kelurahan
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang dikonsolidasi	2
21	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	2
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah	8 Kali

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 (setelah perubahan)

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp28.250.050
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp28.250.050
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.295.910.253
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.205.630.653
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Rp90.279.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp23.129.910

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp23.129.910
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp72.490.100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp4.789.800
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp67.700.300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp699.463.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp326.390.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp34.433.250
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp15.886.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp18.130.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp304.622.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp130.256.100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp68.592.600
Pengadaan Mebel	Rp13.203.900
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp48.459.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp405.920.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17.251.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp388.669.350
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp547.658.964
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp219.463.258
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp57.173.543
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp23.781.793
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp247.240.370
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp220.712.360
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp127.731.100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp21.340.760
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp71.640.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.820.398.203
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp807.103.800
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.128.226.400
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.885.068.003
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.375.680.534
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp2.168.489.200
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp168.537.000
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Rp2.038.654.334
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp4.661.214.300
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp47.763.100
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.248.274.100
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.733.700
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.320.443.400
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.801.479.500

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Rp58.207.200
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp1.743.272.300
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp20.207.717.010
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan	Rp208.588.000
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	
Jalan dan Jembatan	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp654.641.280
Pengelolaan Leger Jalan	Rp104.977.130
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp174.115.900
Rekonstruksi Jalan	Rp11.790.998.600
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp4.224.019.100
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp1.886.828.108
Pemeliharaan rutin Jembatan	Rp699.203.096
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp53.658.746
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp410.687.050
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp69.720.720
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp18.445.820
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rp51.274.900
Konstruksi	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp568.107.948
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp25.454.200
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa	Rp27.720.600
Konstruksi	
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan	Rp514.933.148
Material dan Peralatan	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Rp72.378.900
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp72.378.900
Bidang Penataan Ruang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Rp584.787.700
Kabupaten/Kota	

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp584.787.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp163.792.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Rp163.792.800
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp921.069.348
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp921.069.348
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp151.513.800
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp151.513.800
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp51.909.590
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp51.909.590

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73.22%	99.92%	Sangat Tinggi	Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82.07%	99.92%	Sangat Tinggi	Bidang SDAD
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	59.71%	99.63%	Sangat Tinggi	Bidang PBBK
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	86.25%	124,28%	Sangat Tinggi	Bidang Tata Ruang

Sumber : Perhitungan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yang menggambarkan peran dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator – indikator tersebut yaitu:

1. Indeks Kualitas Jalan

Indeks Kualitas Jalan diukur berdasarkan data persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang dengan masing – masing pembobotan 70% dan 30%. Panjang jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang serta jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang diperoleh dari hasil survey yang mulai dilakukan pada pertengahan tahun berjalan. Survey ini dilaksanakan oleh pihak ke tiga. Pada tahun 2022, pemilihan penyedia dilaksanakan dengan menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung. Survey kondisi jalan dilaksanakan oleh PT. ARDI DARMA ENGINEERING dengan nomor kontrak 602.21/752/423.108/2022 dan survey kondisi jembatan dilaksanakan oleh PT. ARDI DARMA ENGINEERING dengan nomor kontrak 602.21/1215/423.108/2022.

Survey Kondisi Jalan atau *Road Condition Survei* (RCS) menggunakan metode penilaian *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan metode penilaian

perkerasan berdasarkan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. Terdapat 4 (empat) variable penilaian SDI yaitu:

- b. *Total Area of Cracks* (Luas retakan) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - < 10% SDI = 5
 - 10% – 30% SDI = 20
 - > 30% SDI = 40
- c. *Average Crack Widths* (Lebar retakan) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - FINE < 1 mm
 - MED 1 – 3 mm
 - WIDE > 3 mm SDI = SDI * 2
- d. *Total Number of Potholes* (Jumlah lubang) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - < 10 / Km SDI = SDI + 15
 - 10 – 50 / Km..... SDI = SDI + 75
 - > 50 / Km SDI = SDI + 225
- e. *Average Depth of Wheel Rutting* (Kedalaman bekas roda) dengan skala penilaian sebagai berikut:
- NONE
 - < 1 Cm X = 0.5..... SDI = SDI + 5 * X
 - 1 – 3 Cm..... X = 2 SDI = SDI + 5 * X
 - > 3 CmX = 5 SDI = SDI + 20

Total nilai SDI yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengamatan lapangan kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan kondisi jalan dengan penilaian sebagai table berikut ini:

KONDISI JALAN	SDI
Baik	< 50
Sedang	50 - 100
Rusak Ringan	100 - 150
Rusak Berat	> 150

Sumber: Bina Marga, 2011

Bridge Management System (BMS) merupakan sistem manajemen jembatan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang berfungsi sebagai pembuat rencana kegiatan jembatan, pelaksanaan dan pemantauan. Pada pemeriksaan dan penilaian kondisi elemen jembatan menurut BMS terbagi dalam 5 (lima) level, kelima level ini terbagi sesuai dengan kode dan evaluasi elemen kerusakannya. Untuk sistem penilaian tingkat kerusakan yang terjadi dan keberfungsian daripada elemen jembatan dinilai dengan melihat struktur, kerusakan, kuantitas, fungsi, dan pengaruh. Penilaian pada struktur untuk kondisi berbahaya dengan nilai kondisi 1 dan untuk kondisi tidak berbahaya dengan nilai 0. Pada kerusakan parah diperoleh dengan nilai 1, sedangkan kondisi tidak parah dengan nilai 0. Untuk kuantitas yang lebih dari 50% dengan nilai kondisi 1 dan untuk kuantitas kurang dari 50% dengan nilai kondisi 0. Nilai kondisi di dapatkan dengan menambah nilai kondisi pada struktur, kerusakan, kuantitas, fungsi dan pengaruh. Untuk usulan penanganan jembatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Kriteria	Nilai	Katagori	Usulan penganan
Kondisi	0 – 2	Baik	Pemeliharaan rutin dan berkala
	3	Sedang	Rehabilitasi
	4 atau 5	Buruk	Penggantian

Sumber: Anonim 1993

Panjang Jalan Kota Terbangun di Kota Pasuruan sepanjang 78,933 Km sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/237/423.011/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/182/423.011/2018 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Pasuruan. Dari hasil survey lapangan diperoleh panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 66,003 Km (83,62%) dan panjang bangunan pelengkapanya dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 33,700 Km dari total panjang bangunan pelengkap jalan sepanjang 64,089 Km. (52,58%). Dari total 58 buah jembatan di Kota Pasuruan terdapat 41 jembatan dalam kondisi baik dan sedang (70,69%). Sehingga nilai Indeks Kualitas Jalan diperoleh dari perhitungan berikut:

- Persentase Panjang Jalan Kota dan Bangunan Pelengkapya dalam Kondisi Baik = $70\% \times \% \text{panjang jalan kondisi baik dan sedang} + 30\% \times \% \text{panjang bangunan pengelkap kondisi baik dan sedang}$
 $= 70\% \times 83,62\% + 30\% \times 52,58\%$
 $= 74,31\%$

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2022 = $70\% \times \text{persentase jalan kota dan bangunan pelengkapya dalam kondisi baik dan sedang} + 30\% \times \text{jembatan dalam kondisi baik dan sedang}$

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2022 = $70\% \times 74,31\% + 30\% \times 70,69\%$

Nilai akhir Indek Kualitas Jalan Tahun 2022 = $73,22\%$

Dari target tahun 2022 sebesar 73,28% dapat terealisasi sebesar 73,22% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksanya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan.

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

2. Indeks Layanan Drainase

Indeks Layanan Drainase dihitung berdasarkan data panjang irigasi kondisi baik dan panjang drainase kondisi baik. Nilai – nilai tersebut diperoleh dari hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh petugas survey lapangan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPR Kota Pasuruan. Survey dilaksanakan dalam periode satu tahun secara bertahap. Survey ini dilakukan menggunakan alat ukur manual.

Penilaian hasil survey didasarkan pada kondisi kerusakan fisik di lapangan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Baik jika kondisi saluran $> 90\%$ atau tingkat kerusakan $< 10\%$ dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin
- Rusak ringan jika kondisi saluran $80\% - 90\%$ atau tingkat kerusakan $10\% - 20\%$ dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala

- Rusak sedang jika kondisi saluran 60% - 80%, atau tingkat kerusakan 21% - 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan
- Rusak berat jika kondisi saluran < 60% atau tingkat kerusakan > 40% kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian

Panjang total irigasi di Kota Pasuruan adalah 53.894m sedangkan panjang saluran drainase kota pasuruan adalah 18.191m. Data tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/279/423.011/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/311/423.011/2019 tentang Penetapan Status Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase. Berdasarkan hasil survey diperoleh panjang irigasi kondisi baik 45.678,758 m (84,76%) dan panjang drainase kondisi baik 14.441m (79,39%). Sehingga nilai akhir indeks layanan drainase tahun 2022 adalah:

Indeks Layanan Drainase tahun 2022 = 50% x %irigasi kondisi baik + 50% x %drainase kondisi baik

Indeks Layanan Drainase tahun 2022 = 50% x 84,76% + 50% x 79,39%

Indeks Layanan Drainase tahun 2022 = 82,07%

Dari target tahun 2022 sebesar 82,14% dapat terealisasi sebesar 82,07% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat.

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.

3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara

Indikator Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara diukur berdasarkan jumlah Gedung Negara kondisi baik dibandingkan dengan jumlah Gedung negara yang dibutuhkan. Data – data pendukung tercapainya indikator ini berasal dari hasil

survey. Pada tahun 2021 dilakukan survey pada gedung negara di Kota Pasuruan meliputi fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah sebagai data dasar jumlah gedung negara kondisi baik sebanyak 513 gedung negara. Pengukuran dilakukan pada masing – masing komponen struktur gedung (pondasi, struktur, atas, plafond, dinding, lantai, utilitas dan finishing). Sesuai dengan peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia nomor 22/PRT/M2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Kerusakan dimaksud dapat dikategorikan menjadi:

- Kerusakan Ringan

Kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit langit, penutup lantai dan dinding pengisi

- Kerusakan Sedang

Kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya

- Kerusakan Berat

Kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya

Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada tingkat kerusakan pada pekerjaan standar (struktur, arsitektur, ME, finishing)

a. Rusak ringan $\leq 30\%$

b. Rusak sedang $> 30\%$ s.d. 45%

c. Rusak berat $> 45\%$

Pada tahun selanjutnya, penambahan jumlah gedung negara dalam kondisi baik berdasarkan jumlah gedung negara yang dilakukan rehabilitasi atau pembangunan pada tahun terkait. Pada tahun 2022 terdapat penambahan bangunan gedung dalam kondisi baik sebanyak 16 gedung sehingga total bangunan gedung dalam kondisi baik adalah 529 Gedung Negara.

Jumlah kebutuhan bangunan Gedung Negara Kota Pasuruan dihitung berdasarkan pendataan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi terhadap jumlah unit bangunan gedung negara (1

atap = 1 unit gedung) pada masing-masing fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan peta citra satelit. Diperoleh data jumlah gedung negara tersedia sebanyak 738 Gedung Negara. Kemudian dilakukan sampling kebutuhan gedung negara pada masing – masing fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perdagangan serta gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah dan diperoleh hasil bahwa dibutuhkan penambahan jumlah gedung sebanyak 20% dari total jumlah gedung yang ada sehingga didapatkan dibutuhkan gedung negara hingga tahun 2026 sebanyak 886 Gedung Negara. Sehingga nilai akhir indeks kualitas bangunan gedung negara tahun 2022 adalah:

$$\text{Indek kualitas bangunan gedung negara} = \frac{\text{Jumla Gedung Negara Kondisi Baik}}{\text{Jum Gedung Negara yang dibutuhkan}}$$

$$\text{Indek kualitas bangunan gedung negara} = \frac{529 \text{ Ged Negara}}{886 \text{ Gedung Negara}}$$

$$\text{Indek kualitas bangunan gedung negara} = 59,71\%$$

Dari target tahun 2022 sebesar 59,93% dapat terealisasi sebesar 59,71% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,63% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya pembangunan semasa covid 19 membuat ada kesenjangan besar antara target dan capaian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukan pembangunan yang melebihi target tahunan sehingga kesenjangan bisa dikejar di tahun-tahun berikutnya dan target rpjmd dapat tercapai.

4. Indeks Penataan Ruang

Indeks Penataan Ruang diukur berdasarkan data persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang dan kawasan yang mempunyai rencana detail dengan masing – masing pembobotan 70% dan 30%.

Kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari analisa perhitungan data Luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW sebesar 3892,25 Ha dibagi dengan total luas Kota Pasuruan sebesar 3900,07 Ha. Data luasan lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW tersebut diperoleh melalui

proses pengumpulan data primer (survey lapangan) oleh tim internal bidang tata ruang sepanjang tahun 2022.

Kawasan yang mempunyai rencana detail diperoleh dari perhitungan Jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada tahun 2022 sebanyak 6 Dokumen ketataruangan yaitu 1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 – 2041, 4 Dokumen RDTR pada 4 Kecamatan dan 1 Dokumen RTBL dibagi dengan 11 dokumen ketataruangan (1 Dokumen RTRW Kota Pasuruan tahun 2022 – 2041, 4 dokumen RDTR pada 4 Kecamatan dan 6 Dokumen Penataan Ruang). Dokumen RTRW dan RDTR disusun melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli Tata Ruang selama tahun 2021 akan tetapi disahkan menjadi Perda RTRW dan Perwali RDTR pada tahun 2022. Sedangkan, dokumen RTBL disusun oleh pihak ketiga melalui pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi. Penyusunan dokumen RTBL ini dilaksanakan oleh PT. ENVIRO KONSULTAMA dengan nomor kontrak 602.1/1943/423.108/RTBL/TR2/2022 tanggal 1 September 2022.

Sehingga nilai Indeks Penataan Ruang diperoleh dari perhitungan berikut:

• $(70\% \times \% \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang}) + (30\% \times \% \text{Kawasan yang Mempunyai Rencana Detail})$

$= \{70\% \times \%(\text{luas lahan yang sesuai pola ruang RTRW} / \text{luas kota pasuruan})\} + \{30\% \times \%(\text{jumlah dokumen ketataruangan yang dikerjakan pada thn tersebut} / \text{jumlah dokumen ketataruangan selama 5 tahun})\}$

$= \{70\% \times \%(\text{3892,25 Ha} / \text{3900,07 Ha})\} + \{30\% \times \%(\text{6 dokumen} / \text{11 dokumen})\}$

$= (70\% \times 99,80\%) + (30\% \times 54,55\%)$

$= 86,22\%$

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2022 = 70% x persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang + 30% x persentase Kawasan yang Mempunyai Rencana Detail

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2022 = 70% x 99,80% + 30% x 54,55%

Nilai akhir Indeks Penataan Ruang Tahun 2022 = 86,22%

Dari target tahun 2022 sebesar 69,40% dapat terealisasi sebesar 86,22% sehingga tingkat capaiannya adalah 124,28% dalam kategori sangat tinggi.

Pencapaian ini didukung oleh RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 yang sudah ditetapkan serta RDTR yang terintegrasi dengan OSS sehingga meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Pasuruan. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah adanya perubahan regulasi pada masa transisi pelaksanaan Perda RTRW dan Perwali RDTR sehingga butuh banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur						
	Sasaran: Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	71.31%	73,28%	73.22%	99.92%
		Indeks Layanan Drainase	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	81.83%	82,14%	82.07%	99.92%
		Indeks Kualitas Bangunan	Belum menjadi	Belum menjadi	57.90%	59,93%	59.71%	99.63%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Gedung Negara	indikator kinerja	indikator kinerja				
		Indeks Penataan Ruang	Belum menjadi indikator kinerja	Belum menjadi indikator kinerja	64.33%	69,40%	86.25%	124,28%

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yang menggambarkan kinerja dari masing-masing bidang. Keempat indikator tersebut adalah Indeks Kualitas Jalan, Indeks Layanan Drainase, Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Indeks Penataan Ruang. Indikator-indikator tersebut baru digunakan pada tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2022 realisasi indikator indeks penataan ruang melebihi yang ditargetkan dengan capaian 124,28%. Hal ini dikarenakan tersusunnya dokumen ketataruangan yang dengan jumlah yang melebihi target. Dokumen-dokumen yang telah tersusun adalah Dokumen RTRW, RDTR (4 Kecamatan) dan RTBL.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas				

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial				
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73.22%	79,14%	92,52%
		Indeks Layanan Drainase	82.07%	83,42%	98,38%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59.71%	66,25%	91,00%
		Indeks Penataan Ruang	86.25%	94,75%	90,12%

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Uraian penjelasan tabel:

Semua tingkat kemajuan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai lebih dari 90%. Secara umum hal ini dikarenakan tertibnya administrasi serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	penunjang aktivitas ekonomi dan sosial				
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73.22%	-	
		Indeks Layanan Drainase	82.07%	-	
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59.71%	-	
		Indeks Penataan Ruang	86.25%	-	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan pula perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain. Namun pada LKjIP Dinas PUPR 2022 tidak dapat menyajikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan sesuai dengan penjelasan pada Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari, dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kedua SPM tersebut bukan merupakan kewenangan dari Dinas PUPR melainkan menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Namun, pencapaian panjang jalan dalam kondisi mantab di Kota Pasuruan dapat dibandingkan dengan panjang jalan kondisi mantab pada tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi mantab di Kota Pasuruan sebesar 83,62%. Pencapaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi

mantab jalan Provinsi dan jalan Nasional. Sesuai data yang bersumber dari website <https://data.pu.go.id>. Namun data yang tertera pada website ini hanya data jalan kondisi mantab tahun 2021. Jalan Nasional kondisi mantab tahun 2021 sebesar 91,80% dan Jalan Provinsi Jawa Timur kondisi mantab tahun 2021 sebesar 93,60%

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73.22%	99.92%	Factor pendukung: terlaksanya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten	Memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Faktor penghambat: bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan	anggaran yang tersedia
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82.07%	99.92%	Faktor Pendukung: terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten Faktor penghambat: survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat	Memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							RTK Theodolite
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	59.71%	99.63%	Faktor pendukung: terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten Faktor penghambat: kurangnya pembangunan semasa covid 19 membuat ada kesenjangan besar antara target dan capaian	dilakukan pembangunan yang melebihi target tahunan sehingga kesenjangan bisa dikejar di tahun-tahun berikutnya dan target rpjmd dapat tercapai.
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	86.25%	124,28%	Faktor pendukung: RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 yang sudah ditetapkan serta RDTR yang terintegrasi dengan OSS sehingga meningkatkan	Memaksimalkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						penyelenggaraan penataan ruang di Kota Pasuruan Faktor penghambat: adanya perubahan regulasi pada masa transisi pelaksanaan Perda RTRW dan Perwali RDTR sehingga butuh banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang	

Sumber : *Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Uraian penjelasan tabel:

Pencapaian indikator – indikator sasaran telah melebihi 90%. Capaian indikator ini didukung oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fisik serta kegiatan rutin yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen RTRW yang selama beberapa tahun kebelakang terdapat kendala selama proses pengesahan, pada tahun 2022 berhasil ditetapkan dan serta RDTR sudah terintegrasi dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS).

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur							
	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73.22%	99.92%	19.805.407.410	15.344.3589.22	77,48%	22,52%
	Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Layanan Drainase	82,14%	82.07%	99.92%	8.416.791.097	7.177.734.216	85,28%	14,72%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	59.71%	99.63%	7.092.531.548	5.763.389.058	81,26%	18,74%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	86.25%	124,28%	720.959.400	582.468.101	80,79%	19,21%

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian penjelasan tabel:

Anggaran pada masing – masing indikator sasaran strategis berasal dari anggaran program pendukung indikator tersebut. Rata-rata SILPA program pendukung sasaran strategis sebesar 18,80% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Jalan didukung oleh program penyelenggaraan jalan dengan SILPA sebesar 22,52%. Hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dapat

dimaksimalkan disebabkan oleh SK. Dana Cadangan sudah tidak berlaku/masa berlaku sudah habis dan belum dapat diterbitkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur serta sisa penawaran.

2. Indeks Layanan Drainase didukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan total SILPA sasaran strategis Indeks Layanan Drainase sebesar 14,72%. Hal ini dikarenakan rendahnya harga penawaran paket pekerjaan fisik.
3. Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan total SILPA sasaran strategis Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara sebesar 18,74%. Hal ini dikarenakan rendahnya harga penawaran paket pekerjaan fisik.
4. Indeks Penataan Ruang didukung oleh Program Penataan Ruang dengan SILPA 19,21%. Hal ini dikarenakan sisa penawaran lelang dan baru disahkan SK FPRD di akhir tahun.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkat kan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur						

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkat nya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	99.92%	Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang	74,31%	Menunjang	
					Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	70,69%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	83,62%	Menunjang	
		Indeks Layanan Drainase	99.92%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	84,89%	Menunjang	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola	84,40%	Menunjang	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Persentase Pengembangan dan Penelolan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang terlaksana	84,89%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	99,29%	Menunjang	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung yang ditingkatkan Langsung dengan Sungai	99,29%	Menunjang	
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	99.63%	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	84,88%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Persentase penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	70,35%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang terlaksana			
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	60,82%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	55,08%	Menunjang	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	66,67%	Menunjang	
					Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	40,00%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	-	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Konstruksi yang dilaksanakan			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi	93,75%	Menunjang	
		Indeks Penataan Ruang	124,28%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	54,55%	Menunjang	
					persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	99,80%	Menunjang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota secara tepat waktu	100%	Menunjang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi untuk Pemanfaatan Ruang	100%	Menunjang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian	100%	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota	pemanfaatan ruang			
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	95,83%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	66,67%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan Daerah	layanan perkantoran		2022 namun akan dilaksanakan revisi Renstra di tahun 2023	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan revisi Renstra di tahun 2023	Menunjang kegiatan rutin di DPUPR
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	76,53%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan revisi Renstra di tahun 2023	Urusan Pertanahan
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	214,29%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan revisi	Urusan Pertanahan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah Kabupaten/Kota	secara tepat waktu		Renstra di tahun 2023	
				Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase petak tanah yang bersertifikat	272,70%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Urusan Pertanahan
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	272,70%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Urusan Pertanahan
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah yang dikonsolidasi	14,29%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Urusan Pertanahan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan kaji ulang penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	250,00%	Tidak menunjang sasaran strategis 2022 namun akan dilaksanakan reviu Renstra di tahun 2023	Urusan Pertanahan

Sumber : Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian penjelasan tabel:

Pada saat penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, terdapat kesalahan administrasi dimana Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan pendukung kegiatan-kegiatan rutin kesekretariatan dalam upaya mencapai Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP tidak menjadi sasaran stragetis OPD serta terjadi kesalahan dalam penentuan indikator tujuan dimana IKU OPD seharusnya indeks infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk mengajukan permohonan penyusunan reviu Dokumen Renstra tahun 2021 – 2023 di tahun 2023.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. 1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.203.079.873	7.841.460.951	95,59%
2	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.250.050	17.750.000	62,83%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.295.910.253	6.062.754.979	96,30%
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.129.910	17.729.600	76,65%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.490.100	51.539.800	71,10%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.463.750	659.844.862	94,34%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.256.100	120.504.000	92,51%
8	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.920.750	404.034.580	99,54%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.658.960	507.303.130	92,63%
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.041.110.563	3.443.040.690	85,20%
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	220.712.360	188.994.500	85,63%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
12	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.820.398.203	3.254.046.190	85,18%
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.375.680.534	3.734.693.526	85,35%
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.375.680.534	3.734.693.526	85,35%
15	Program Penataan Bangunan Gedung	4.661.214.300	3.801.435.428	81,55%
16	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.661.214.300	3.801.435.428	81,55%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.801.479.500	1.468.199.935	81,50%
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.801.479.500	1.468.199.935	81,50%
19	Program Penyelenggaraan Jalan	19.805.407.410	15.344.358.922	77,48%
20	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	19.805.407.410	15.344.358.922	77,48%
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	629.837.748	493.753.695	78,39%
22	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kostruksi	61.729.800	61.693.600	99,94%
23	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	568.107.948	432.060.095	76,05%
24	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	720.959.400	582.468.101	80,79%
25	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	72.378.900	67.136.000	92,76%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	484.787.700	384.087.101	79,23%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	163.792.800	131.245.000	80,13%
28	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	487.979.348	383.924.151,00	78,68%
29	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	487.979.348	383.924.151,00	78,68%
30	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	151.513.800	120.738.875	79,69%
31	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.513.800	120.738.875	79,69%
32	Program Penatagunaan Tanah	51.909.590	18.051.800	34,78%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	51.909.590	18.051.800	34,78%

Sumber : *Monev Tribulan IV Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Uraian penjelasan tabel:

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sebesar Rp37.232.126.074,- dari total anggaran Rp44.930.172.066,- sehingga tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 82,87% dengan SILPA sebesar Rp7.698.045.992,- yang sebagian besar dikarenakan tingginya sisa harga penawaran.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang didukung dengan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Jalan, Indeks Layanan Drainase, Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Indeks Penataan Ruang.

Indeks Kualitas Jalan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 73,28% dan terealisasi sebesar 73,22% sehingga nilai capaian sebesar 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pemeliharaan rutin pada seluruh ruas jalan kota dan jembatan serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah bertambahnya kerusakan jalan dan jembatan dari asumsi pada saat perencanaan. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik serta pemeliharaan rutin jalan, bangunan pelengkap dan jembatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia.

Indeks Layanan Drainase pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,14% dan terealisasi sebesar 82,07% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,92% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase serta terlaksananya pembangunan fisik yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah survey yang dilaksanakan masih secara manual dengan menggunakan alat ukur meteran roll sehingga tingkat ketelitiannya kurang akurat. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pembangunan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia serta melaksanakan survey kondisi dengan menggunakan alat dengan ketelitian cukup akurat berupa GPS RTK Theodolite.

Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 59,93% dan terealisasi sebesar 59,71% sehingga nilai capaian sebesar 99.63% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang dikerjakan oleh penyedia yang memiliki keahlian dan

berkompeten. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya pembangunan semasa covid 19 membuat ada kesenjangan besar antara target dan capaian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukan pembangunan yang melebihi target tahunan sehingga kesenjangan bisa dikejar di tahun-tahun berikutnya dan target rpjmd dapat tercapai.

Indeks Penataan Ruang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 69.40% dan terealisasi sebesar 86.25% sehingga nilai capaian sebesar 124.28% dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini didukung oleh RTRW dan RDTR Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 yang sudah ditetapkan serta RDTR yang terintegrasi dengan OSS sehingga meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Pasuruan. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini adalah adanya perubahan regulasi pada masa transisi pelaksanaan Perda RTRW dan Perwali RDTR sehingga butuh banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang. Guna mencapai target pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Kota Pasuruan, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



GUSTAP PURWOKO, ST, MT
NIP. 19670624 199803 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTAP PURWOKO, ST., MT.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALIKOTA PASURUAN
Selaku atasan langsung pihak pertama


Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 4 Januari 2022

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**


GUSTAP PURWOKO, ST., MT
Pembina TK. I
NIP. 19670824 199803 1 005

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF


**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON II**


NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST., MT.
 NIP : 19670824 199803 1 005
 PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I / IV b
 JABATAN/ Kelas jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	B
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.422.170.200	DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.054.990.563	DAU
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 4.404.180.534	DAU
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 4.086.298.300	DAU
5.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 1.801.479.500	DAU
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 39.251.687.790	DAU + DAK
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 825.835.577	DAU

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 918.059.400	DAU
9.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 976.069.348	DAU
10.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee	Rp. 151.513.800	DAU
11.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 89.909.590	DAU
JUMLAH		Rp. 65.982.194.602	APBD

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 4 Januari 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

GUSTAP PURWOKO, ST., MT
Pembina TK. I
NIP. 19670824 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN EBELON II**

NAMA : GUSTAP PURKONO, ST., MT.
 NIP : 19070824 199803 1 005
 PANGKAT/GOL. : Pembina Tk. I / IV b
 JABATAN/ Kelas Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	OUTPUT/OUTCOME																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi											
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan Indeks Layanan Drainase Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	%	71,92 81,82 58,35	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13	0,11 0,03 0,13											
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjalankan Pelayanan Prima	Indeks Pelayanan Ruang Nasi SANGI PD Pembinaan pelayanan perencanaan pelaksanaan program dukungan sasaran PD Pembinaan pelayanan anggaran yang dibudidayakan	% point	64,33 15,86	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11	0,42 11										
CAPAIAN OUTPUT					7,12	0	7,34	0	10,55	0	12,60	0	7,37	0	12,03	0	7,40	0	7,45	0	7,41	0	7,33	0	7,24	0	0	0	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

No	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		Target	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	9.422.170.260	DAU
2	Program Pengendalian Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	4.054.990.563	DAU
3	Program Pengendalian Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	4.404.180.334	DAU
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	4.266.258.300	DAU
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	1.801.479.500	DAU
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	39.251.687.790	DAU + DAK
7	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Rp.	825.533.577	DAU
8	Program Penyelenggaraan Pemukiman Rata-rata	Rp.	918.059.400	DAU
9	Program Penyelenggaraan Ganti Kerugian Dan Statutan Tanah Untuk Pembangunan	Rp.	976.069.348	DAU
10	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelembagaan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp.	151.512.800	DAU
11	Program Penatausahaan Tanah	Rp.	89.000.000	DAU
JUMLAH		Rp.	65.982.194.602	

Pasuruan, 4 Januari 2022
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 GUSTAP PURKONO, ST., MT.
 Pembina Tk. I / IV b
 NIP. 19070824 199803 1 005

Mengesah,
 Pejabat Aides Jengong
 WALIKOTA PASURUAN

 SAIFULLAH YUSEF

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTAP PURWOKO, ST., MT.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALIKOTA PASURUAN
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

GUSTAP PURWOKO, ST., MT
Pembina TK. I
NIP. 19670824 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON II**

NAMA : GUSTAP PURWOKO, ST., MT.
 NIP : 19670824 199803 1 005
 PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I / IV b
 JABATAN/ Kelas jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	73,28%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,14%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	59,93%
		Indeks Penataan Ruang	69,4%	69,4%
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP PD	B	-
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	100%	-
		Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	-

No.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.422.170.200	Rp. 8.203.079.873	DAU
2.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp. 4.054.990.563	Rp. 4.041.110.563	DAU
3.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp. 4.404.180.534	Rp. 4.375.680.534	DAU
4.	Program penataan bangunan gedung	Rp. 4.086.298.300	Rp. 4.661.214.300	DAU
5.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rp. 1.801.479.500	Rp. 1.801.479.500	DAU


No.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
8	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp. 918.059.400	Rp. 720.959.400	DAU
9	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp. 976.069.348	Rp. 487.979.348	DAU
10	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Rp. 151.513.800	Rp. 151.513.800	DAU
11	Program penatagunaan tanah	Rp. 89.909.590	Rp. 51.909.590	DAU
JUMLAH		Rp.65.982.194.602	Rp.44.930.172.066	

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 17 Oktober 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



GUSTAF PURWOKO, ST., MT

Pembina TK. I
NIP. 19670824 199803 1 005

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Nama Perangkat Daerah Nama Daerah selama 5 tahun

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Infrastruktur	72,00%	73,05%	74,35%	75,80%	76,95%
2	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota penunjang aktivitas ekonomi dan sosial	Indeks Kualitas Jalan	73,28%	77,50 %	79,32%	81,32%	83,62%
		Indeks Layanan Drainase	82,14%	82,46%	82,78%	83,10%	83,42%
		Indeks Kualitas Bangunan Gedung Negara	59,93%	61,51%	63,09%	64,67%	66,25%
		Indeks Penataan Ruang	69,40%	74,47%	84,55%	89,64%	94,75%